

Judul : DPR RI Pastikan Kesiapan Sarana dan Transportasi Mudik tahun Ini
Tanggal : Selasa, 26 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR RI Pastikan Kesiapan Sarana dan Transportasi Mudik Tahun Ini

BERDASARKAN survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 85 juta orang akan mudik pada Lebaran tahun ini. Angka itu bahkan naik 40% jika dibandingkan dengan 2019 sebelum pandemi. Hal ini tak terlepas dari keputusan pemerintah untuk kembali memperbolehkan mudik setelah dua tahun sebelumnya dilarang karena pandemi covid-19 yang masih merebak.

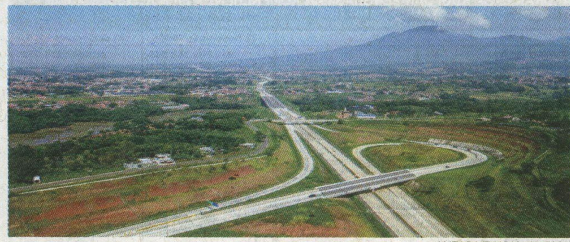
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah memfasilitasi masyarakat yang hendak mudik sebaik mungkin. Hal tersebut untuk mengantisipasi potensi kemacetan parah yang akan terjadi pada mudik Lebaran 2022.

"Segala persiapan dan langkah antisipasi harus disiapkan pemerintah sebaik dan sedini mungkin, agar masyarakat bisa mudik dengan selamat dan tenang. Siapkan skenario terburuk jika terjadi kemacetan parah di luar prediksi," kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (19/4).

Untuk itu, kesiapan sarana dan prasarana mudik tahun ini harus ditingkatkan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, baik saat arus mudik maupun arus balik. Hal ini juga menjadi perhatian Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Menjelang Lebaran 2022, Komisi V DPR gencar meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi di berbagai daerah.

Baru-baru ini, di Tangerang, Banten, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras memimpin tim Kunker Komisi V DPR melaksanakan fungsi pengawasan ke Provinsi Lampung dan Banten guna mengetahui kesiapan infrastruktur dan transportasi di wilayah tersebut.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, dari pihak BPJT



ANTARA/RAISAN AL FARISI

PERSIAPAN MUDIK: Foto udara batas ruas Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi I dan Seksi II yang akan dioperasikan untuk mudik lebaran di Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022).

(Badan Pengatur Jalan Tol) sudah melaksanakan antisipasi. Dari Kementerian PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga sudah melakukan upaya maksimal. Sebagian besar jalan-jalan sudah terantisipasi dengan baik dan diharapkan bisa siap semua sebelum Lebaran," kata Andi.

Saat memimpin tim Kunker Komisi V ke Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah, anggota Komisi V DPR Sudjadi meminta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat betul-betul memastikan setiap penumpang transportasi darat mendapatkan kenyamanan serta keamanan.

"Berdasarkan survei potensi pergerakan pada angkutan 2022, jumlah pemudik akan mengalami kenaikan sesuai dua tahun tertunda mudik, efek pandemi covid-19. Maka, Kemenhub wajib memastikan penumpang harus mendapatkan kenyamanan serta keamanan pada saat perjalanan mudik mendatang," ujar politikus PDIP itu.

Dia pun mengingatkan agar ada peningkatan sinergi kerja sama yang baik antarberbagai *stakeholders* terkait. Di antaranya kerja

sama antara Dishub dan pihak pengelola terminal dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mengatur pergerakan antisipasi lonjakan pemudik di terminal dan stasiun.

Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti mengimbau Kemenhub khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersinergi dengan KAI untuk menambah jumlah gerbong rangkaian kereta api.

"Pengguna moda transportasi kereta api yang akan turun ataupun naik melalui Stasiun Balapan diprediksi akan berjumlah sekitar 19 kali lipat dari total jumlah penumpang Januari 2022. Hal ini harus menjadi perhatian dan fokus bagi PT KAI, Kemenhub, dan juga Pemerintah Kota Solo untuk menambah jumlah gerbong rangkaian kereta api dalam rangka sebagai langkah konkret mengantisipasi kepadatan penumpang guna mencegah penyebaran covid-19 serta demi keamanan dan keselamatan penumpang," ujar Novita.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Provinsi Sumatera Barat, anggota Komisi V DPR Athari Gauthi Ardi menilai persiapan sarana dan prasarana transportasi di sana sudah cukup baik. Ia

meyakini pada H-10 semua sarana dan prasarana sudah siap 100%.

Athari mendorong pihak Angkasa Pura agar menambah personel guna mengantisipasi lonjakan arus mudik ini. Ia mengatakan beberapa kasus yang pernah terjadi khususnya menyangkut soal bagasi, dampak dari kurangnya personel.

"Seperti kasus yang viral kemarin, soal bagasi itu karena jumlah personel yang kurang. Kami mengerti kemarin dikurangi karena pandemi dan aktivitas di bandara juga sedikit, tetapi sekarang sudah balik seperti semula, artinya jumlah personel bandara juga harus dikembalikan juga seperti semula," ujarnya.

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan sejumlah *stakeholders* perhubungan, anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan pemerintah perlu memperhatikan lonjakan arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Secara tegas, Syarif meminta Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meningkatkan sinergi dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan berbagai langkah antisipasi saat mudik Lebaran.

Lebih lanjut, politikus Partai NasDem ini mengingatkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak perusahaan *airlines*. Dengan demikian, lonjakan pemudik di bandara dapat dikendalikan sedini mungkin.

"Jangan sampai terjadi kekacauan di bandara saat terjadi lonjakan penumpang karena saat ini kita mengalami perubahan dari kurang normal menuju normal," tegas Syarif. (Ifa/S2-25)